

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Eksistensialisme

Eksistensialisme pertama kali dipelopori oleh Jean Paul Sartre, filsuf asal Perancis. Namun filsuf asal Yunani seperti Aristoteles dan Socrates pernah membahas mengenai eksistensi. Eksistensi berasal dari Bahasa Latin, *existere*, yang artinya, ada, timbul, dan berada. Adapun dasar pemikiran eksistensi ialah:

1. Motif pokoknya adalah eksistensi, cara khas manusia berada. Pusat perhatian adalah manusia.
2. Bereksistensi adalah dinamis, menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, merencanakan. Manusia, setiap saat, selalu berubah kurang atau lebih dari keadaan sebelumnya. Tidak ada 'state of being'.
3. Manusia dipandang terbuka, sebagai realitas yang belum selesai. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitar, terutama kepada sesama manusia
4. Memberikan tekanan pada pengalaman eksistensial kongkrit manusia misalnya kepada kematian, penderitaan, kesalahan, perjuangan¹.

Kierkegaard yang dikenal sebagai bapak eksistensialisme, merupakan tokoh yang biasanya menjadi rujukan terhadap pemikiran eksistensialisme aliran

¹ Harun Hadiwijiono, Sari Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2016) halaman 149

theistik. Ia menyatakan bahwa eksistensi manusia bersifat konkrit dan individual. Jadi, pertama yang penting bagi manusia adalah keberadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Kerena hanya manusia yang dapat bereksistensi. Namun, harus ditekankan, bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu “ada” yang statis, melainkan suatu “menjadi, yang mengandung didalamnya suatu perpindahan, yaitu perpindahan dari “kemungkinan” ke “kenyataan”²

Seperti pendapat Kierkegaard, bahwa setiap manusia adalah campuran dari ketakterhinggaan dengan keterhinggaan. Manusia merupakan gerak ke arah Tuhan. Tetapi manusia juga berpisah dari Tuhan. Manusia dapat mengatakan “ya” kepada hubungannya dengan Tuhan dalam iman, atau mengatakan sebaliknya “tidak”. Kalau ia mengatakan “ya”, akan menjadi ia yang ada, yaitu individu yang berhadapan dengan Tuhan³.

Aristoteles melakukan negosiasi eksistensi dengan materi yang berforma substansi dengan menggunakan definisi yang tepat. Jika Aristoteles melakukan negosiasi dengan materi substansi tertentu, Plato berpendapat bahwa esensi lebih nyata dari sebuah partisipasi. Plato berpendapat bahwa seorang individu mengetahui apa esensi dari dirinya lebih tinggi daripada individu atau kelompok berpartisipasi dalam suatu peristiwa.

Pemikiran mengenai eksistensial terbagi menjadi dua, yaitu filsafat religius dan gerakan sekuler⁴. Filsafat religius dipelopori oleh Barth dan Bruner tokoh Teologi Protestan sedangkan gerakan sekuler dipelopori oleh Heidegger.

² Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat 2*, (Yogyakarta: Kanisius), halaman 124

³ Loekisno Choiril Warsito, 104

⁴ Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme dan Humanisme* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2018), halaman

Gerakan sekuler ini merupakan sumber eksistensialisme. Pada dasarnya, eksistensialisme bertentangan dengan teori historis.

Menurut Sartre, eksistensi adalah sebuah doktrin yang memungkinkan hidup manusia menjadi mungkin dengan subjektivitas kemanusiaan⁵. Sartre juga membagi eksistensialis menjadi dua jenis. Yang pertama eksistensialis Kristen yang dipelopori oleh Jaspers dan Gabriel Marcel. Kedua, eksistensialis Atheis yang dipelopori oleh Heidegger dan Sartre sendiri⁶. Kedua jenis ini memiliki kesamaan bahwa eksistensi mendahului esensi. Maksud dari eksistensi mendahului esensi ialah, manusia pertama-tama berhadapan dengan dirinya sendiri, lalu terjun ke dunia dan kemudian mendefinisikan dirinya sendiri⁷.

Eksistensialisme memiliki beberapa efek, diantaranya:

1. Filsafat ini menempatkan manusia pada posisi sebagai dirinya sendiri, dan meletakkan keseluruhan tanggung jawab hidupnya di kehidupan manusia itu sendiri
2. Memiliki makna dirinya sendiri, bukan berarti bahwa setiap orang di antara harus memilih dirinya sendiri, tetapi juga bahwa dalam memilih dirinya sendiri, manusia memilih untuk semua

Pada dasarnya eksistensialisme memandang tentang kebebasan manusia itu sendiri. Bagaimana manusia ada dalam dunia dan menemukan esensinya di dunia ini. Sartre juga mengatakan bahwa manusia bukan lah suatu benda yang bisa diikat karena manusia tercipta bukan untuk itu. Manusia diciptakan-Nya untuk mencari tahu sendiri apa yang akan dia lakukan terhadap hidupnya agar manusia sendiri menemukan esensi manusia itu diciptakan.

⁵ Ibid, halaman 6

⁶ Ibid, halaman 40

⁷ Ibid halaman 44

Sementara Karl Jaspers, menguraikan eksistensi manusia dalam karyanya “Philosophie” (1932), bahwa eksistensi manusia pada dasarnya adalah suatu panggilan untuk mengisi karunia kebebasannya. Dengan demikian, “ada”nya manusia selalu ditentukan oleh situasi-situasi konkrit. Eksistensi manusia selalu berada dalam situasi-situasi tertentu, situasi-situasi dimana manusia menemukan dirinya inilah yang disebut oleh Jasper dengan “situasi-situasi batas”⁸

2. Politik Identitas

Pemahaman tentang politik identitas harus didasari dengan identitas. Identitas adalah ciri atau tanda yang melekat pada seorang individu yang menjadi ciri khasnya. Identitas dihubungkan dengan atribut seseorang yang merupakan sifat majemuk. Atribut terbagi dua pertama, atribut kodrat yang sudah ada sejak seseorang lahir (gender, ras, agama, dan suku), dan yang kedua atribut non kodrat yang merupakan atribut yang dibuat oleh seseorang baik usaha dan kerja kerasnya, misalnya seseorang yang terjun didunia politik akan mempunyai identitas politik⁹.

Setelah identitas, maka muncullah identitas sosial. Identitas sosial menurut Taffel, merupakan bagian dari konsep diri individu yang bersumber dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial dengan berbagai jenis nilai, norma, dan ikatan emosional yang berkembang dalam kelompok tersebut¹⁰. Sedangkan menurut Aftonul Afif, identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada

⁸ Ibid, 103.

⁹ Apakah Itu Identitas, (www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html#, 17 April, 2019)

¹⁰ Aftonul Afif, Menjadi Indonesia Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia (Yogyakarta: Perikesit Institute, 2010), halaman 33

dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli, dan kebanggaan sebagai anggota kelompok tersebut¹¹.

Penjelasan mengenai identitas sosial di atas kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat berkelompok karena ada kesamaan di antara antaranggota kelompok yang membuat mereka berinteraksi, berpartisipasi, dan beberapa aktivitas lainnya. Suatu individu biasanya berkelompok karena dua alasan, yang pertama mempunyai kepentingan yang sama, dan yang kedua adanya kesamaan yang di bawa dari lahir.

Kelompok yang terbentuknya di latarbelakangi oleh kesamaan yang dibawa dari lahir biasanya akan membentuk kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Contohnya saja di Indonesia banyak masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, sehingga Islam dijadikan agama mayoritas di Indonesia dan juga Suku Jawa populasinya terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi mayoritas di Indonesia.

Dari kelompok mayoritas tersebut, maka muncullah rasa egois yang berasal dari kelompok mayoritas, agar segala sistem harus bertolak ukur pada kelompok mayoritas tersebut. Setelah sistem mengikuti tuntutan mayoritas, maka minoritas akan menjadi tersisihkan. Saat kelompok minoritas tersisihkan, muncullah politik identitas.

Politik identitas bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Jika hak-hak minoritas diabaikan maka kesejahteraan akan hilang dari kehidupan mereka. Seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya, pernah berlakunya kebijakan tata nilai Syariat Islam di Kota Tasikmalaya, maka kelompok minoritas akan

¹¹ Ibid, halaman 33

merasa didiskriminasi yang tentunya akan membuat mereka jauh dari keadaan sejahtera karena bagaimana pun juga, kebudayaan mayoritas akan mereka ikuti walaupun kebudayaan itu tidak cocok dengan mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Cressida Heyes yang mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teori terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu¹². Selain itu, Agnes Heller juga mendefinisikan politik identitas merupakan konsep dan gerakan politis yang fokus perhatiannya adalah perbedaan yang dijadikan sebagai kategori utama¹³.

B. Penelitian Terdahulu

1. Risa Fajariani (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul Diskriminasi Etnis Tionghoa Pada masa Orde Baru dan Reformasi, mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Latar belakang pemerintah orde baru mengeluarkan aturan-aturan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoadi Indonesia karena peristiwa kegagalan kudeta kerirka mulai berkuaa menjadi pemimpin negara Indonesia oleh Partai Komunis Indonesia, maka itu etnis Tiongoa dituduh mempunyai hubungan erat dengan negara asli leluhur, yaitu Tiongkok

¹² Cressida Heyes, Identity Politics, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, diakses dari [Plato.Stanford.edu/entries/identity-politics](https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics)

¹³ Engki Julianto (Skripsi), Politik Identitas di Malaysia (Studi pada Film Upin Ipin yang Berjudul Gong Xi Fa Cai (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014), halaman 18

- b. Imbas dari aturan diskriminatif di Tasikmlaya, banyak masyarakat Etnis Tionghoa yang mengganti nama mereka ke nama Indonesia, dan juga banyak yang berpindah keyakinan dari Konghucu ke aga Islam atau Nasrani.
- c. Setelah orde baru berakhir, perlahan-lahan aturan-aturan yang diskriminatif tersebut diganti oleh pemimpin baru pengganti pemimpin orde baru. Begitu juga di Tasikmalaya, perubahan tersebut berhasil membuat agama Koghucu diakui oleh pemerintah, Imlek bisa dilaksanakan terbuka dan juga kesenia budaya Tionghoa dapat dipertunjukkan di ruang publik.

2. Suryani Ana (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Kasus Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru) mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Orientasi politik Etnis Tionghoa pasca orde baru, semangat berpolitik etnis ini kembali muncul dengan membentuk beberapa partai politik.
- b. Pasca orde baru, perkembangan orde baru penting untuk diamati. Nilai multikulturalisme yang dibangun dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, memberi kepercayaan bahwa Etnis Tionghoa sama dengan etnis lainnya di Indonesia, mengabdikan pada kehidupan, bangsa, dan negara Indonesia.

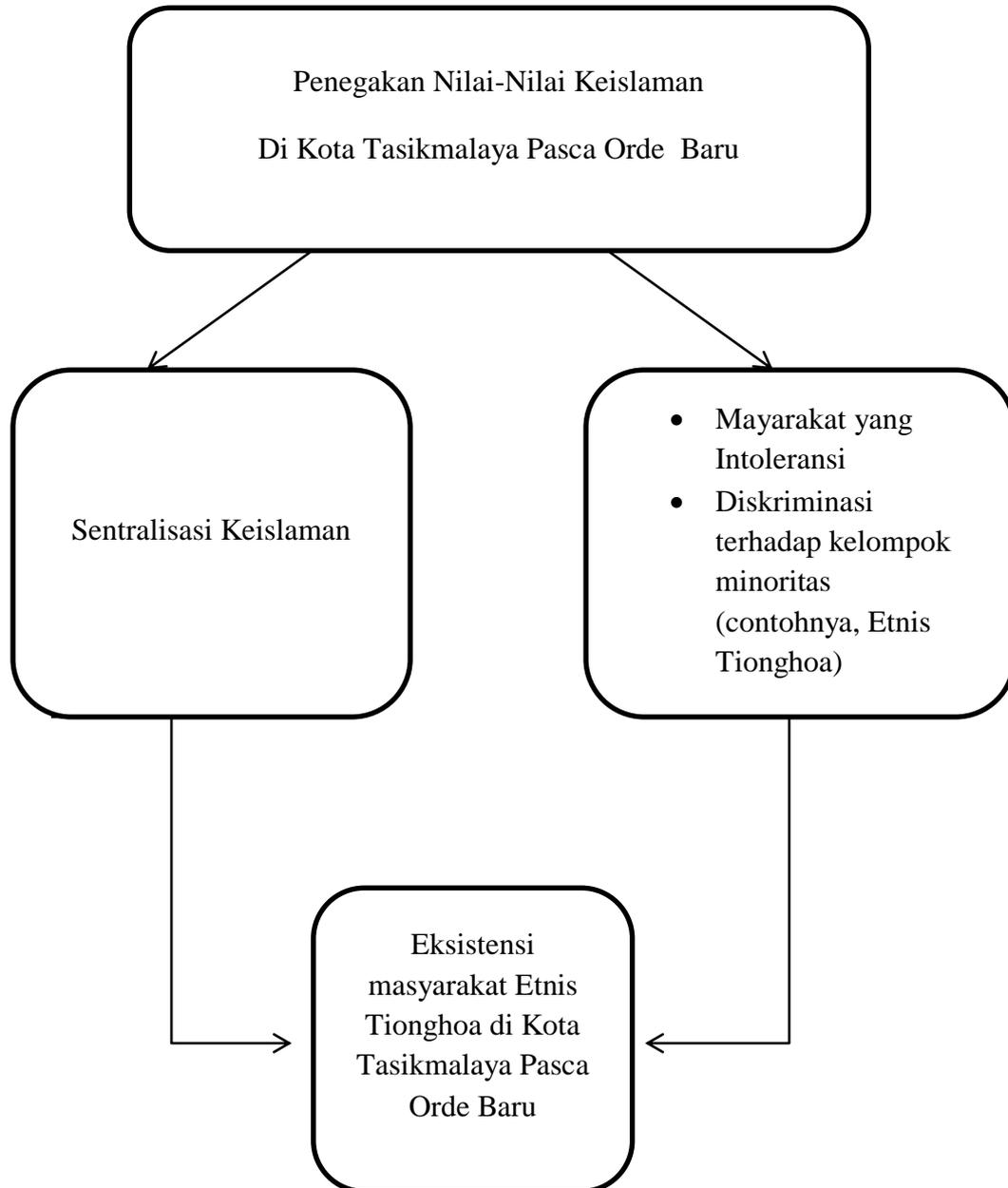
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Risa Fajriani	Diskriminasi Etnis Tionghoa Pada Orde Baru dan Refomasi	Penelitian ini sama sama memfokusnya suatu kelompok etnis yaitu Etnis Tionghoa	Penelitian ini membahas diskriminasi yang ditujukan pada masa orde baruu dan reformasi
2	Suryani Ana	Politik dentitas dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Kasus Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru)	Sama sama memfokuskan tentang etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru	Penelitian ini membahas bagaimna semangat berpolitik pasca orde baru muncul dan bagaimana perkembangannya

3	Jenny Sandria Pardede	Eksistensi Etnis Tionghoa di Tasikmalaya Pasca Orde Baru	Fokus penelitian yang diambil ialah kelompok Etnis Tionghoa	Penelitian ini membahas bagaimana Etnis ini pasca orde baru
---	--------------------------	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Multikulturalisme merupakan salah satu paham yang dianut oleh bangsa Indonesia. Inibisa dilihat dari keanekaragaman yang terjadi di Indonesia. Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapit tetap satu jua.

Namun sama seperti negara multikulturalisme yang lainnya, seperti Amerika Serikat, Eropa, Indonesia juga mengalami konflik sosial yang di latarbelakangi oleh multikulturalisme. Permasalahan multikulturalisme di Indonesia bukan hanya antarsuku dan antaragama tetapi juga kebijakan pemerintah yang mendukung diskriminasi. Multikulturalisme telah menyebabkan pemisahan antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

Pada masa orde lama dan orde baru masing-masing pemerintahan mengeluarkan kebijakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Di masa pemerintahan orde baru, kebijakan diskriminatif dilakukan secara terang-terangan. Beberapa diantaranya ialah kebijakan tentang pelarangan menunjukkan kebudayaan China di ruang publik, tidak mengakui bahwa Konghucu adalah agama, dan lain sebagainya.’

Lalu pada masa reformasi kebijakan reformasi kebijakan diskriminatif tidak dilakukan oleh negara. Hanya saja otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih mempunyai hak otonom atas daerahnya. Contohnya saja Provinsi Aceh yang mendapat hak istimewa seperti berlakunya Syariat Islam, partai politik daerah dan sebagainya dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberlakukan sistem kerajaan untuk pemerintah provinsi.

Namun pada pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, Indonesia kembali lagi mengalami konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh multikulturalisme. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama dan juga kasus TOA Masjid yang dilakukan oleh Meilina menyebabkan kasus intoleransi di Indonesia bertambah.

Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak lembaga survey yang mengatakan bahwa beberapa kota toleran dan kota intoleran di Indonesia. Salah satu lembaga survey yang melakukan penelitian tersebut ialah SETARA Institute. Di hasil penelitiannya, Singkawang merupakan kota yang paling toleran sementara itu Bogor merupakan kota yang paling intoleran dan Kota Tasikmalaya (Priangan Timur) merupakan salah satu kota yang intoleran.

Hasil survey yang dilakukan oleh SETARA Institute tentu sangat berpengaruh terhadap kelompok minoritas di Tasikmalaya khususnya Etnis Tionghoa yang sebelumnya juga pernah menjadi sasaran amuk massa pada tahun 1996. Lalu bagaimana eksistensi etnis ini di Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu Kota Intoleran menurut SETARA Institute?